



LKjIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2025

Tahun 2026



Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Paser

KATA PENGANTAR

Terdorong oleh keinginan dan kesadaran untuk maju dan mengejar ketertinggalan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Paser khususnya. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, perlu adanya niat dan tekad serta keikhlasan dari seluruh komponen organisasi untuk bekerja dengan baik dan bertanggung jawab.

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 29 Tahun 2014 Tentang system Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka dibuat dan disusun Laporan Kinerja tahun 2025 sebagai wujud Akuntabilitas Dinas Kependudukan dan Pencatatan dan Sipil.

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025 ini dirasakan belum sepenuhnya memenuhi harapan sebagai mana dalam Surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, namun demikian diharapkan Laporan Kinerja yang telah kami susun ini dapat memberikan gambaran kinerja yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dan semoga bermanfaat bagi yang berkepentingan.

Tanah Grogot, 26 Februari 2026

Kepala,



Mohd. Ismail Yanuardi, S. Hut. MM
NIP. 197001051998031010

IKHTISAR EKSEKUTIF

Setiap akhir tahun sesuai dengan ketentuan yang tertuang Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 29 Tahun 2014 Tentang system Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyusun Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja.

Hal ini dimaksudkan untuk mengukur kinerja yang telah dicapai selama satu tahun dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta sebagai bentuk pertanggung jawaban instansi pemerintah kepada masyarakat/publik/stake holder dan sejauh mana aspirasi masyarakat sudah terpenuhi. Untuk dapat melakukan pengukuran kinerja, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebelumnya wajib menyusun Rencana Strategis dimana didalamnya tertuang Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang dijabarkan setiap tahunnya melalui Rencana Kerja Tahunan (RKT). Demikian pula Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser yang merupakan salah satu instansi pemerintah telah juga menetapkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang dituangkan kedalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser tahun 2025.

Untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan tahun 2025 telah dilakukan pengukuran dan evaluasi kinerja yang telah tertuang pada laporan ini.

Adapun tujuan yang hendak dicapai adalah: Meningkatkan Pelayanan dibidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil. Sedangkan Sasaran yang hendak dicapai adalah: Meningkatnya Pelayanan dibidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil. Dalam pencapaian sasaran beberapa kegiatan telah menunjukkan pencapaian yang mengembirakan, namun ada kegiatan yang belum mencapai sasaran yang diharapkan.

Dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam bidang kependudukan dan Pencatatan sipil pada tahun 2025 telah dilaksanakan 5 (Lima) program dengan 12 (Dua Belas) kegiatan dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp. 14.533.997.508,- dan serapan anggaran sebesar Rp. 12.423.165.347,- atau terealisasi sebesar 85,48%.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan Pelaporan Kinerja	1
C. Isu Strategis	2
D. Kedudukan, Tugas Fungsi dan Kewenangan.....	3
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
A. Rencana Strategis	7
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Perangkat Daerah	12
B. Realisasi Anggaran... ..	24
BAB IV PENUTUP	27
LAMPIRAN.....	
1. Perjanjian Kerja 2025	
2. Rencana Aksi 2025	
3. Evaluasi Renja Triwulan IV Tahun 2024	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang System Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah maka setiap akhir periode tahun anggaran instansi melakukan pengukuran pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Hasil pengukuran kinerja tersebut dilaporkan dalam Laporan Kinerja.

Mengacu pada ketentuan tersebut diatas, serta untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme menuju tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), transparansi dan akuntabel, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser menyusun Laporan Kinerja.

Laporan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser Tahun 2025 adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis. Dalam laporan ini disajikan informasi tentang Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Program dan Kegiatan, pencapaian tujuan dan sasaran, realisasi pencapaian indikator kinerja serta penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser Tahun 2025.

B. Maksud dan Tujuan Pelaporan Kinerja

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi secara memadai atas penggunaan anggaran.

Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan akuntabilitas dan pertanggungjawaban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupten Paser atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis, rencana kinerja, dan penetapan kinerja Tahun 2025.
2. Perbaikan dalam perencanaan khususnya perencanaan jangka menengah dan jangka pendek Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser dimasa yang akan datang.
3. Mengukur keberhasilan atau kegagalan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis, perencanaan kinerja tahunan dan penetapan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser Tahun 2025.
4. Memberikan informasi tentang sejauhmana penentuan prinsip-prinsip good governance dapat dilaksanakan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser Tahun 2025.

C. Isu Strategis

Isu Strategis merupakan suatu pokok permasalahan yang sedang hangat dibicarakan atau sedang dalam proses akan terjadi tentang kependudukan. Permasalahan mendesak terkait dengan kependudukan Kabupaten Paser yang ditangani oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser tidak terlepas dari isu-isu pembangunan pada pemerintah Kabupaten Paser. Berdasarkan isu-isu pembangunan Kabupaten Paser maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggung jawab membantu Bupati Paser di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka dalam kurun waktu 5 tahun dapat diidentifikasi Isu Strategis sebagai berikut:

Tabel 1.1

Identifikasi Isu-isu Strategis dan Permasalahan Pembangunan

No	Isu dan Masalah Strategis Pembangunan		
	Tingkat Nasional	Tingkat Provinsi	Tingkat Kab/Kota
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Penerapan E-KTP Nasional	Penerapan E-KTP Nasional	Penerapan E-KTP Nasional Berbasis NIK
2.	Pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	Koordinasi, Supervisi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan	Cakupan registrasi penduduk dan pencatatan sipil
3.	Pembentukan database kependudukan	Pelaporan data hasil SIAK dan data registrasi	Ketersediaan pengembangan infrastruktur SIAK dan database kependudukan yang valid dan akurat

D. Kedudukan, Tugas Fungsi dan Kewenangan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Paser Nomor 49) mempunyai Struktur Organisasi sebagaimana lampiran dokumen ini. Sedangkan susunan organisasi Dinas dapat dideskripsikan sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan Program;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Umum;
- c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, membawahi:
 - 1) Seksi Identitas Penduduk;
 - 2) Seksi Pindah Datang Penduduk;

- 3) Seksi Pendataan Penduduk;
- d. Bidang Pelayanan dan Pencatatan Sipil, membawahi :
 - 1) Seksi Perkawinan dan Perceraian;
 - 2) Seksi Kelahiran dan Kematian;
 - 3) Seksi Perubahan Status Anak dan Kewarganegaraan;
- e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, membawahi:
 - 1) Seksi Sistem Informasi administrasi Kependudukan;
 - 2) Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan;
 - 3) Seksi Tata Kelola dan SDM Teknologi Informasi dan komunikasi
- f. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, membawahi:
 - 1) Seksi Kerjasama;
 - 2) Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan;
 - 3) Seksi Inovasi Pelayanan.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan operasional di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah.
- b. Penetapan kebijakan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- c. Pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang meliputi Kependudukan, Pelayanan Pencatatan Sipil, Pembinaan dan Pengendalian penduduk sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan fungsi dan tugasnya.
- e. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan.

Adapun jenis pelayanan yang diselenggarakan sesuai ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana di ubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil meliputi pelayanan:

- 1) KTP WNI
- 2) KTP WNA
- 3) SKTT
- 4) Akta Perkawinan
- 5) Akta Perkawinan yang terlambat pelaporan
- 6) Akta Perceraian
- 7) Akta Perceraian yang terlambat pelaporan
- 8) Kutipan Kedua Akta Perkawinan
- 9) Kutipan Kedua Akta Perceraian
- 10) Surat Keterangan Pindah
- 11) Akta Pengakuan Anak
- 12) Akta Pengesahan Anak
- 13) Kutipan Kedua Akta Pengakuan Anak
- 14) Kutipan Kedua Akta Pengesahan Anak
- 15) Akta Pengangkatan Anak
- 16) Akta Pengangkatan Anak yang melebihi waktu pelaporan
- 17) Surat Keterangan Perubahan Nama
- 18) Salinan Akta Perkawinan
- 19) Salinan Akta Perceraian
- 20) Salinan Akta Kematian
- 21) Salinan Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak
- 22) Surat Keterangan Pelaporan dan Tanda Bukti pelaporan mengenai Kelahiran, Perkawinan, Perceraian, Kematian yang terjadi di luar negeri
- 23) Surat Keterangan Kependudukan

Sedangkan jumlah pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser sebagai mana tabel berikut:

Tabel 1.2
Jumlah PNS Disdukcapiil Berdasarkan Tingkat Golongan dan Tingkat Pendidikan Tahun 2025.

Golongan Pendidikan	Es I	Es II	Es III	Es IV	Jumlah
1. SD	-	-	-	-	-
2. SLTP	-	-	-	-	-
3. SLTA	-	-	-	27	27
4. D III	-	-	-	4	4
5. S – 1	-	-	2	31	33
6. S – 2	-	1	1	-	2
Jumlah	-	1	3	20	66

Tabel 1.3
Jumlah Pegawai Disdukcapiil Berdasarkan Eselon Tahun 2025

Tingkatan Eselon	Jumlah	Keterangan
Eselon II B	1	Kepala Dinas
Eselon III A	1	Sekretaris
Eselon III B	2	Ka.Bidang
Eselon IV A	2	Ka.Sub.Bagian
Non Eselon PNS	53	Staf Pelaksana
Pegawai Tidak Tetap	8	PJLP
Jumlah	67	Personil

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Disdukcapil Kabupaten Paser adalah suatu dokumen Perencanaan yang berorientasi pada hal yang ingin dicapai dalam kurun waktu 2022-2026, sehubungan dengan tugas dan fungsi Disdukcapil dengan mempertimbangan lingkungan strategis. Rencana Strategis Disdukcapil Kabupaten Paser merupakan penjabaran visi dan misi Kepala Daerah dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) tahun 2022-2026:

Misi ke-2	Tujuan ke-1	Sasaran ke-2
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien melalui Pemerintahan yang Profesional, Partisipatif dan Transparan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Responsif Dan Tangkas	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Tujuan jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser merupakan suatu kondisi yang ingin dicapai atau diwujudkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, yang dirumuskan dengan memperhatikan dukungan terhadap visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih serta dilengkapi dengan alat ukur/indikator untuk mengetahui tingkat keberhasilannya yang akan dipertanggungjawabkan pada akhir periode perencanaan.

1. Tujuan dan indikator Rencana Strategis Disdukcapil Kabupaten Paser

Sejalan dengan hal itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menetapkan **Tujuan** Perangkat Daerah yang merupakan jawaban atas isu-isu strategis dan alasan strategis yang akan dicapai pada jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang ada 2 (dua) tujuan, yaitu:

Tujuan 1 “Meningkatkan Penataan dan Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Paser”

Dan menetapkan indikator Tujuan 1 dalam Rencana Strategis Disdukcapil Kabupaten Paser adalah:

“Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kependudukan”

2. **Sasaran dan indikator sasaran Rencana Strategis Disdukcapil Kabupaten Paser** Tujuan Perangkat Daerah ini selanjutnya diterjemahkan kedalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai oleh Perangkat Daerah. Adapun sasaran jangka menengah pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022-2026, yaitu:

1. Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
Indikator sasaran 1: Rata-rata waktu penyelesaian dokumen kependudukan (KK, KIA dan KTP),
Indikator sasaran 2: Rata-rata waktu penyelesaian dokumen catatan sipil (akte kelahiran, kematian, pengangkatan anak, perkawinan/perceraian).
2. Meningkatnya Instansi Pengguna Data Kependudukan;
Dengan indikator sasaran 1: Persentase Lembaga Yang Memanfaatkan Data Kependudukan.

3. Tujuan 2 **“Meningkatnya tata kelola perangkat daerah yang responsif dan tangkas”**

Dan menetapkan indikator Tujuan 2 dalam Rencana Strategis Disdukcapil Kabupaten Paser adalah:

“Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi”

4. **Sasaran dan indikator sasaran Rencana Strategis Disdukcapil Kabupaten Paser** Tujuan Perangkat Daerah ini selanjutnya diterjemahkan kedalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai oleh Perangkat Daerah. Adapun sasaran jangka menengah pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022-2026, yaitu:

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah;
Dengan indikator sasaran 1: Penilaian SAKIP.

Berikut disajikan hubungan tujuan dan sasaran yang adakan dilaksanakan oleh Disdukcapil:

Tabel 2.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Disdukcapil Kabupaten Paser

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja (Tujuan, Impact, Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendataan					Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
			2022	2023	2024	2025	2026	
TUJUAN 1: Meningkatkan Penataan dan pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Paser	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kependudukan	n/a	80	81	82	83	84	84
SASARAN 1: Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Rata-rata waktu penyelesaian dokumen kependudukan (KK, KIA dan KTP)	n/a	2	2	2	2	2	2
	Rata-rata waktu penyelesaian dokumen catatan sipil (akte kelahiran, kematian, pengangkatan anak, perkawinan/perceraian)	n/a	1	1	1	1	1	1
SASARAN 2: Meningkatnya Instansi Pengguna Data Kependudukan	Persentase Lembaga Yang Memanfaatkan Data Kependudukan	n/a	10	15	20	25	30	30
TUJUAN 2: Meningkatnya tata kelola perangkat daerah yang responsif dan tangkas	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	n/a	65	72	74	76	80	80
SASARAN 3: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Penilaian SAKIP	n/a	61	65	70	75	81	81

Uraian penjelasan tabel:

Untuk isian pada tabel Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020), 5 dari 6 indikator adalah n/a karena indikator tersebut belum pernah terukur sebelum tahun 2022.

A. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra yang mencakup periode tahunan. Rencana kinerja menggambarkan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan indikator kinerja beserta targetnya berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Target kinerja tahunan di dalam Renja ditetapkan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran, program dan kegiatan. Target kinerja tersebut merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam satu periode tahunan. Untuk mengukur pencapaian sasaran strategis, ditetapkan indikator kinerja beserta targetnya yang dijabarkan pertahun. Indikator Kinerja tersebut seluruhnya bersifat outcome yang sangat dipengaruhi oleh pihak eksternal. Demikian pula dengan target yang ditetapkan berdasarkan hasil pembahasan bersama dengan seluruh Bidang pengampu melalui Rapat Internal.

Dari Indikator Kinerja Sasaran Strategis tersebut, Disdukcapil Kabupaten Paser menetapkan IKU sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategisnya. Penetapan IKU yang mengacu pada Renstra Disdukcapil tahun 2022-2026. IKU Disdukcapil Kabupaten Paser yang akan digunakan dengan target kinerja yang ingin dicapai Disdukcapil Kabupaten Paser Tahun 2025 yang merupakan juga perjanjian kinerja Disdukcapil adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
2. Meningkatnya Instansi Pengguna Data Kependudukan
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Untuk mewujudkan kinerja tersebut, Disdukcapil Kabupaten Paser mendapat dukungan anggaran dari APBD sebesar Rp. 14.533.997.508,00 yang digunakan untuk melaksanakan 5 Program dan 12 Kegiatan yang tercantum pada Perjanjian Kinerja berikut:

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	1. Rata-rata waktu penyelesaian dokumen kependudukan (KK, KIA dan KTP)	60 Menit
		2. Rata-rata waktu penyelesaian dokumen catatan sipil (akte kelahiran, kematian, pengangkatan anak, perkawinan/perceraian)	30 Menit
2.	Meningkatnya Instansi Pengguna Data Kependudukan	1. Persentase Lembaga Yang Memanfaatkan Data Kependudukan	25%
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1. Penilaian SAKIP	70

PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	KET
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	Rp. 12.341.591.192,-	APBD
Kegiatan Perencanaan, Penggaran, dan Evaluasi PD	Rp. 251.374.000,-	
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 9.678.528.467,-	
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 2.285.778.725,-	
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Rp. 125.910.000,-	
2. Program Pendaftaran Penduduk	Rp. 319.891.975,-	APBD
Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Rp. 304.891.975,-	
Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran penduduk	Rp. 15.000.000,-	
3. Program Pencatatan Sipil	Rp. 238.620.075,-	APBD
Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil	Rp. 218.620.075,-	
Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Rp. 20.000.000,-	
4. Program Pengelolaan Administrasi Kependudukan	Rp. 1.468.977.866,-	APBD
Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Data Kependudukan	Rp. 732.020.000,-	
Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Adminduk	Rp. 386.957.866,-	
Kegiatan pembinaan dan pengawasan pengelolaan informasi Administrasi kependudukan	Rp. 350.000.000,-	
5. Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Rp. 164.916.400,-	APBD
Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan	Rp. 164.916.400,-	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Perangkat Daerah

Setiap akhir periode instansi melakukan pengukuran pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan. Pengukuran pencapaian kinerja ini bertujuan untuk menilai keberhasilan sebuah organisasi. Pengukuran pencapaian target kinerja dapat dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1
Capaian IKU Disdukcapil Tahun 2025

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Sumber Data
1.	Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Rata-rata waktu penyelesaian dokumen kependudukan (KK, KIA dan KTP)	60 Menit	60 Menit	100%	Sangat Tinggi	PIAK
		Rata-rata waktu penyelesaian dokumen catatan sipil (akte kelahiran, kematian, pengangkatan anak, perkawinan/perceraian)	30 Menit	30 Menit	100%	Sangat Tinggi	PIAK
2.	Meningkatnya Instansi Pengguna Data Kependudukan	Persentase Lembaga Yang Memanfaatkan Data Kependudukan	25%	31,70%	126,80%	Sangat Tinggi	PIAK
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Penilaian SAKIP	70	64,52	92,17%	Tinggi	Sekretariat

Uraian penjelasan table:

- Sasaran kinerja Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil diukur dengan 2 indikator. Indikator kinerja pertama yaitu Rata-rata waktu penyelesaian dokumen kependudukan (KK, KIA dan KTP) dengan capaian kinerja 100% dari target yang di tetapkan 60 Menit dengan realisasi 60 Menit. Dan indikator kinerja kedua yaitu Rata-rata waktu penyelesaian dokumen catatan sipil (akte kelahiran, kematian, pengangkatan anak, perkawinan/perceraian) dengan capaian kinerja 100% dari target yang di tetapkan 30 Menit dengan realisasi 30 Menit. Dengan Rata-rata capaian sasaran 1 kinerja 100%.

2. Sasaran Kinerja Meningkatnya Instansi Pengguna Data Kependudukan diukur dengan indikator kinerja Meningkatnya Instansi Pengguna Data Kependudukan dengan capaian kinerja 126,80% dari target yang ditetapkan 25% dengan realisasi 31,70%.
3. Sasaran kinerja Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah diukur dengan indikator Penilaian SAKIP dengan capaian kinerja 92,17% dengan target 70 dan realisasi 64,52.

Perbandingan kinerja tahun 2025 dengan tahun sebelumnya diuraikan pada tahun berikut:

Tabel 3.2

Perbandingan Capaian Kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	2023			2024			2025			Capaian Kinerja 2023-2025	Unit Kerja yang Bertanggung jawab
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian		
1.	Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Rata-rata waktu penyelesaian dokumen kependudukan (KK, KIA dan KTP)	2 Jam	2 Jam	100%	2 Jam	2 Jam	100%	60 Menit	60 Menit	100%	100%	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
		Rata-rata waktu penyelesaian dokumen catatan sipil (akte kelahiran, kematian, pengangkatan anak, perkawinan/perceraian)	1 Jam	1 Jam	100%	1 Jam	1 Jam	100%	30 Menit	30 Menit	100%	100%	Bidang Pencatatan Sipil
2.	Meningkatnya Instansi Pengguna Data Kependudukan	Persentase Lembaga Yang Memanfaatkan Data Kependudukan	15%	46,34%	308,93%	20%	35,71%	178,55%	25%	31,70%	126,80%	204,76%	Bidang PIAK dan Bidang PDIP
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Penilaian SAKIP	65	60,58	99,31%	70	60,31	86,15%	70	64,52	92,17%	92,54%	Sekretariat

Uraian penjelasan tabel:

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser pada akhir periode diuraikan sebagai berikut:

1. Capaian Kinerja “Rata-rata waktu penyelesaian dokumen kependudukan (KK, KIA dan KTP)” telah mencapai 100%”
2. Capaian Kinerja “Rata-rata waktu penyelesaian dokumen catatan sipil (akte kelahiran, kematian, pengangkatan anak, perkawinan/perceraian)” telah mencapai 100%.

3. Capaian Kinerja “Persentase Lembaga Yang Memanfaatkan Data Kependudukan” telah melampaui target dengan capaian sebesar 204,76%.
4. Capaian Kinerja “Penilaian SAKIP” mencapai 92,54%.

Tabel 3.3

Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Akhir Renstra

No.	Sasaran	Indikator	Tahun 2025			Target Akhir Renstra	Tingkat Kemajuan
			Target	Realisasi	Capaian		
1.	Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Rata-rata waktu penyelesaian dokumen kependudukan (KK, KIA dan KTP)	60 Menit	60 Menit	100%	2 Jam	200%
		Rata-rata waktu penyelesaian dokumen catatan sipil (akte kelahiran, kematian, pengangkatan anak, perkawinan/perceraian)	30 Menit	30 Menit	100%	1 Jam	200%
		Rata-rata capaian sasaran 1	100%				
2.	Meningkatnya Instansi Pengguna Data Kependudukan	Persentase Lembaga Yang Memanfaatkan Data Kependudukan	25%	31,70%	126,80%	30%	105,66%
		Rata-rata capaian sasaran 2	126,80%				
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Penilaian SAKIP	70	64,52	92,17%	81	79,65%
		Rata-rata capaian sasaran 3	92,17%				

Uraian penjelasan table:

Dari 4 indikator sasaran diatas, 3 indikator sudah mencapai/melampaui target, dengan rata-rata capaian sasaran 1 yaitu 100% dan sasaran 2 126,80%. Namun ada 1 indikator yang belum mencapai target pada sasaran 3. Dan ini akan menjadi bahan evaluasi kami kedepannya untuk meningkatkan capaian pada indikator tersebut.

Tabel 3.4

Perbandingan realisasi kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.

Paser dengan realisasi kinerja tingkat provinsi dan nasional

Indikator Kinerja Sasaran	Kabupaten Paser	Provinsi	Nasional
Rata-rata waktu penyelesaian dokumen kependudukan (KK, KIA dan KTP)	60 Menit	n/a	n/a
Rata-rata waktu penyelesaian dokumen catatan sipil (akte kelahiran, kematian, pengangkatan anak, perkawinan/perceraian)	30 Menit	n/a	n/a
Persentase Lembaga Yang Memanfaatkan Data Kependudukan	31,70%	n/a	n/a
Penilaian SAKIP	64,52	n/a	66,42

Tabel 3.5
Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi
1.	Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Rata-rata waktu penyelesaian dokumen kependudukan (KK, KIA dan KTP)	60 Menit	60 Menit	100%	Penyelesaian dokumen tepat waktu sesuai standar pelayanan dan pelatihan/bimtek pada SDM Pelayanan	Memaksimalkan pelayanan dan penambahan SDM
		Rata-rata waktu penyelesaian dokumen catatan sipil (akte kelahiran, kematian, pengangkatan anak, perkawinan/perceraian)	30 Menit	30 Menit	100%	Penyelesaian dokumen tepat waktu sesuai standar pelayanan dan pelatihan/bimtek pada SDM Pelayanan	Memaksimalkan pelayanan dan penambahan SDM
2.	Meningkatnya Instansi Pengguna Data Kependudukan	Persentase Lembaga Yang Memanfaatkan Data Kependudukan	25%	31,70%	126,80%	Menjalin sosialisasi dan Kerjasama dengan instansi atau Lembaga yang terkait.	Memperpanjang masa kerjasama dengan instansi terkait dan melakukan kegiatan Bimtek bagi operator OPD atau lembaga yang baru menjalin kerjasama pemanfaatan data kependudukan.
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Penilaian SAKIP	70	64,52	92,17%	Dokumen kinerja belum sesuai dengan sistematika, dan masih terdapat tidak kesesuaian atau keselarasan pada beberapa dokumen kinerja.	Koordinasi dan konsultasi dengan perangkat daerah yang memonitoring penyusunan dokumen-dokumen kinerja serta menjaga sinkronisasi data antar dokumen.

Uraian penjelasan table:

Dari 5 indikator sasaran, ada 4 indikator yang sudah mencapai target yang ditetapkan, namun ada 1 indikator yang belum mencapai target. Maka dengan analisis dan solusi yang telah dilakukan, akan menjadi acuan untuk peningkatan kinerja bagi masing-masing bidang yang mengampu indikator sasaran tersebut agar bisa meningkatkan capaian kinerja kedepannya.

AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN 2025

Tabel 3.6

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Adapun penyajian efisiensi atas penggunaan sumber daya disajikan pada table berikut:

No.	Sasaran Strategis	Program	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Realisasi			Efisiensi
							Alokasi Anggaran	Anggaran	(%)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11
I.	Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil		Rata-rata waktu penyelesaian dokumen Kependudukan (KK, KTP, KIA)	60	60	100,00	319.891.975,00	295.186.784,00	92,28	7,72
			Rata-rata waktu penyelesaian dokumen Pencatatan Sipil (Akte Kelahiran, Kematian, Pengangkatan Anak, Perkawinan/Perceraian)	30	30	100,00	238.620.075,00	227.831.864,00	95,48	4,52
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Rasio kepemilikan dokumen kependudukan (KTP, KK, KIA)	98	89,63	91,46	319.891.975	295.186.784	92,28	(0,82)
		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase dokumen dan laporan hasil pelayanan pendaftaran penduduk	98	273,4	278,98	304.891.975	282.438.784	92,64	186,34
		Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	2	2	100,00	15.000.000	7.470.000,00	49,80	50,20
		Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	8000	65.619	820,24	274.891.975	270.722.784,00	98,48	721,75
		Penerbitan Dokumen Atas Hal Laporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	12	12	100,00	15.000.000	4.246.000,00	28,31	71,69

		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase jumlah laporan/data/dokumen penyelenggaraan pendaftaran penduduk	98	100	102,04	15.000.000	12.748.000,00	84,99	17,05
		Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	2	2	100,00	15.000.000	12.748.000,00	84,99	15,01
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Rasio kepemilikan dokumen pencatatan sipil (Akte kelahiran, kematian, nikah, cerai)	98	99,635	101,67	238.620.075	227.831.864	95,48	6,19
		Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase dokumen penyelenggaraan pencatatan sipil	98	128,1	130,71	218.620.075	217.421.864	99,45	31,26
		Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	6000	7.686	128,10	218.620.075	217.421.864,00	99,45	28,65
		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase Jumlah laporan penyelenggaraan pencatatan sipil	98	50	51,02	20.000.000	10.410.000,00	52,05	
		Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pencatatan Sipil	4	2	50,00	20.000.000	10.410.000,00	52,05	
II.	Meningkatnya Instansi Pengguna Data Kependudukan		Persentase data kependudukan yang valid	25	31,7	126,80	1.633.894.266	1.541.098.756	94,32	32,48
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase dokumen dan laporan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	98	100	102,04	1.468.977.866,00	1.391.172.970,00	94,70	7,34
		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	98	100	102,04	732.020.000	724.089.930,00	98,92	3,12
		Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Persentase dokumen dan laporan penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	12	12	100,00	732.020.000	724.089.930,00	98,92	1,08

		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	98	100	102,04	386.957.866	327.728.358	84,69	17,35
		Fasilitas Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2	2	100,00	177.065.615	141.402.720,00	79,86	20,14
		Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	2	2	100,00	76.474.206	56.241.206,00	73,54	26,46
		Kerja sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	Persentase dokumen/laporan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1	1	100,00	133.418.045	130.084.432,00	97,50	2,50
		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendencygunaan Data Kependudukan	98	100	102,04	350.000.000	339.354.682,00	96,96	5,08
		Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendencygunaan Data Kependudukan	Persentase pemanfaatan data kependudukan	4	4	100,00	350.000.000	339.354.682,00	96,96	3,04
		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase laporan profil kependudukan	100	100	100,00	164.916.400	149.925.786,00	90,91	9,09
		Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	100	100	100,00	164.916.400	149.925.786,00	90,91	9,09

		Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain		4	4	100,00	164.916.400	149.925.786,00	90,91	9,09
III.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah		Penilaian SAKIP	70	64,52	92,17	12.341.591.192	10.359.047.943,00	83,94	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	76	93,51	123,04	12.341.591.192	10.359.047.943,00	83,94	39,10
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketepatan tahapan penyusunan dokumen perencanaan PD	100	100	100,00	251.374.000	238.303.239,00	94,80	5,20
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	5	100,00	70.974.000	70.843.303,00	99,82	0,18
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10	10	100,00	37.500.000	36.430.150,00	97,15	2,85
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2	2	100,00	47.900.000	37.028.353,00	77,30	22,70
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	2	100,00	95.000.000	94.001.433,00	98,95	1,05
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase temuan ditindaklanjuti	100	100	100,00	9.678.528.467	8.172.230.705,00	98,95	1,05
			Persentase LHP nihil	100	100	100,00				1,05
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	68	68	100,00	9.188.240.063	7.728.903.771,00	84,12	15,88
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12	12	100,00	490.288.404	443.326.934,00	90,42	9,58

		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100	100	100,00	2.285.778.725	1.940.168.999,00	84,88	15,12
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	20	166,67	896.454.541	796.880.323,00	88,89	77,77
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	1	100,00	5.000.000	4.848.000,00	96,96	3,04
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	28	32	114,29	508.436.987	444.831.815,00	87,49	26,80
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	9	8	88,89	234.129.893	94.535.150,00	40,38	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40	48	120,00	272.051.304	257.736.750,00	94,74	25,26
		Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4	4	100,00	369.706.000	341.336.961,00	92,33	7,67
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang inventaris dalam kondisi baik	50	50	100,00	125.910.000	8.345.000,00	6,63	93,37
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3	3	100,00	53.650.000	8.345.000,00	15,55	84,45
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100	0	-	72.260.000	-	-	

Sumber: Laporan Evaluasi Renja Triwulan IV Tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser

Uraian penjelasan table:

Dari table diatas dapat dijelaskan bahwa dari realisasi yang ada pada masing-masing sasaran, program, kegiatan hingga sub kegiatan rata-rata sudah tercapai, bahkan ada realisasi yang sudah melampaui

target. Dan dapat dilihat pada capaian realisasi anggaran tidak ada yang mencapai 100%, serta hasil perhitungan efisiensi dengan rumus Persentase Capaian Kinerja – Persentase Penyerapan Anggaran x 100% yang ada pada 1 sasaran, 3 program, 6 kegiatan dan 5 sub kegiatan yang memiliki capaian kinerja $\geq 100\%$ menunjukkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten telah melakukan efisiensi anggaran namun tetap merealisasikan target kinerja secara maksimal.

Tabel 3.7
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Non Anggaran

No. Urut	Nama Barang/Jenis Barang	Jumlah	Kondisi Barang		
			Baik	Kurang baik	Rusak Berat
1	PC Unit	73	54	6	13
2	Laptop	43	23	4	16
3	Printer	73	51	2	20
4	AC	3	3	0	0
5	Camera	13	6	0	7
6	Scanner	2	2	0	0
7	Dispenser	5	5	0	0
8	Mesin Tik	2	1	0	1
9	Lemari	5	5	0	0
10	Lemari Kaca	4	4	0	0
11	Filling Cabinet	8	8	0	0
12	Laci	1	1	0	0
13	Rak Besi	3	3	0	0
14	Wireless Amplifier	2	0	2	0
15	Pemotong Kertas	1	1	0	0
16	Sidik Jari	14	4	0	10
17	Rilis Mata	3	3	0	0
18	Alat Tanda Tangan	4	4	0	0
19	UPS	5	5	0	0
20	Pelican	4	4	0	0
21	CPU	2	0	0	2
22	TV	2	1	0	1
23	Tripod Kamera	2	2	0	0
24	Signature Pad	6	0	6	0
25	Rak Server	2	2	0	0
26	Set Mobile Enrollment E-KTP	4	4	0	0
27	Iris Scanner	9	1	4	4
28	Kursi biasa	3	3	0	0
29	Latar Foto	1	1	0	0
30	Lemari Arsip	5	5	0	0

31	Meja	1	1	0	0
32	Mesin Pencacah Kertas	2	2	0	0
33	P.C Unit/Aio	7	2	3	2
34	P.C Unit/Server	3	1	2	0
35	Peralatan Studio Audio Lainnya	1	1	0	0
36	Printer Primacy	3	1	1	1
37	Rak Arsip	6	6	0	0
38	Alat Kantor Lainnya Lain-Lain	1	1	0	0
39	Tripod Kamera	2	2	0	0
Total		328	221 (67,38%)	30 (9,15%)	77 (23,48%)

Sumber: KIR Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Paser, 2025

Uraian penjelasan table:

Dari table diatas dapat dilihat bahwa sumber daya non anggaran berupa aset dalam 3 kondisi yaitu B (Baik), KB (Kurang Baik), dan RB (Rusak Berat), dengan total aset Disdukcapil sampai dengan tahun 2025 yaitu 328 Unit. Dan dari total 328 Unit, Barang dengan kondisi Baik (B) sebanyak 221 Unit (67,38%), dengan kondisi Kurang Baik (KB) sebanyak 30 Unit (9,15%), dan dengan kondisi Rusak Berat (RB) sebanyak 77 Unit (23,48%). Dengan jumlah barang dengan kondisi baik mencapai 67,38% maka Disdukcapil dapat melakukan efisiensi dengan memaksimalkan penggunaan aset yang ada saat ini.

Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja:

Tabel 3.8

Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan atau Kegagalan

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Keberhasilan/kegagalan
1.	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Rasio kepemilikan dokumen kependudukan (KTP, KK, KIA)	89,63%	Secara realisasi kepemilikan KTP sudah melampaui target yaitu sebesar 98,47%, kepemilikan KK sebesar 99,14, namun pada kepemilikan KIA masih pada angka 71,28%. Sehingga saat perhitungan rata-rata kepemilikan dokumen kependudukan (KTP, KK, KIA) masih belum mencapai target.
	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase jumlah dokumen kependudukan pelayanan pendaftaran Penduduk	237,40%	Melakukan upaya dengan meningkatkan pelayanan Dukcapil ke desa-desa.
	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase jumlah laporan/data/dokumen penyelenggaraan pendaftaran penduduk	100%	Melakukan kegiatan sosialisasi sesuai dengan yang sudah diagendakan dalam Rencana Aksi Disdukcapil 2025.
2.	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Rasio kepemilikan dokumen pencatatan sipil (Akte kelahiran, kematian, nikah, cerai)	99,635%	Melakukan upaya dengan meningkatkan pelayanan Dukcapil ke desa-desa.

	Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase Dokumen Pelayanan Pencatatan Sipil	128,09%	Melakukan upaya dengan meningkatkan pelayanan Dukcapil ke desa-desa.
	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase Jumlah laporan penyelenggaraan pencatatan sipil	50%	Efisiensi anggaran pada Triwulan I dan II sehingga belum bisa melaksanakan Penyelenggaraan Sosialisasi, dan pada Triwulan III dan IV kegiatan di desa sangat padat sehingga tidak memungkinkan melakukan sosialisasi yg tepat sasaran.
3.	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase data kependudukan yang valid	100%	Pengolahan data yang termutakhirkan secara berkala.
	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase dokumen dan laporan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	100%	Pengolahan data secara rutin pada rentang waktu per bulan, triwulan, semester dan tahunan.
	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase jumlah dokumen/laporan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100%	Sosialisasi dengan perangkat-perangkat daerah terkait pemanfaatan data kependudukan dan Koordinasi serta sinergi dengan perangkat – perangkat daerah yang telah habis masa kerjasamanya untuk melakukan perpanjangan Kerjasama pemanfaatan data kependudukan.
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase dokumen/laporan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100%	Mengikutsertakan pegawai pada pembinaan dan pengawasan secara menyeluruh.
4.	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase pemanfaatan data kependudukan	100%	Koordinasi dan sinergi dengan perangkat-perangkat daerah yang memanfaatkan data kependudukan.
	Penyusunan Profil Kependudukan	Persentase laporan profil kependudukan	100%	Pelaporan data yg dilaporkan secara mutakhir dan berkala.
5.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks kepuasan pelayanan sekretariat	93,51%	Peningkatan pelayanan dan terpenuhinya kebutuhan kantor oleh sekretariat.
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketepatan tahapan penyusunan dokumen perencanaan PD	100%	Penyusunan dokmen perencanaan dan pelaporan sesuai batas waktu yang di tentukan.
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase temuan ditindaklanjuti	100%	Melengkapi data-data laporan yang dibutuhkan.
		Persentase LHP nihil	100%	Melengkapi data-data laporan yang dibutuhkan.
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100%	Terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan kantor oleh sekretariat.
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang inventaris dalam kondisi baik	50%	Melakukan pemeriksaan dan pemeliharaan barang inventaris kantor secara berkala.

Uraian penjelasan table:

Dari 5 program dan 12 kegiatan, 4 program dan 11 kegiatan sudah mencapai/melampaui target yang ditetapkan, hal ini disebabkan karena sudah melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat secara rutin dengan upaya-upaya dan solusi yang telah dilakukan oleh Disdukcapil. Namun ada 1 program dan 1 kegiatan yang realisasinya tidak mencapai target yaitu program Pendaftaran Penduduk, secara realisasi kepemilikan KTP sudah melampaui target yaitu sebesar 98,47%, kepemilikan KK sebesar 99,14, namun pada kepemilikan KIA masih pada angka 71,28%. Sehingga saat perhitungan rata-rata kepemilikan dokumen kependudukan (KTP, KK, KIA) masih belum mencapai target. Dan untuk kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil, realisasi tidak

mencapai target dikarenakan efisiensi anggaran pada Triwulan I dan II sehingga belum bisa melaksanakan Penyelenggaraan Sosialisasi, dan pada Triwulan III dan IV kegiatan di desa sangat padat sehingga tidak memungkinkan melakukan sosialisasi yg tepat sasaran.

A. Realisasi Anggaran

Dalam rangka pencapaian kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser Tahun 2025 dialokasikan Dana Anggaran Belanja Tidak Langsung (BTL) dan Anggaran Belanja Langsung (BL) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Paser sebagaimana tertuang Dalam DPA-OPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, dengan realisasi keuangan sebagaimana Tabel berikut:

Tabel 3.8
Realisasi Keuangan Disdukcapil Tahun 2025

No.	Program/Kegiatan	Jumlah Dana	Realisasi	Sisa Dana	%
-1	-2	-3	-4	-5	-6
02.12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Rp14.533.997.508,00	Rp12.423.165.347,00	Rp2.110.832.161,00	85,48
02.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp12.341.591.192,00	Rp10.359.047.943,00	Rp1.982.543.249,00	83,94
2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp251.374.000,00	Rp238.303.239,00	Rp13.070.761,00	94,80
2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp70.974.000,00	Rp70.843.303,00	Rp130.697,00	99,82
2.12.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp37.500.000,00	Rp36.430.150,00	Rp1.069.850,00	97,15
2.12.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Rp47.900.000,00	Rp37.028.353,00	Rp10.871.647,00	77,30
2.12.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp95.000.000,00	Rp94.001.433,00	Rp998.567,00	98,95
2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp9.678.528.467,00	Rp8.172.230.705,00	Rp1.506.297.762,00	84,44
2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp9.188.240.063,00	Rp7.728.903.771,00	Rp1.459.336.292,00	84,12
2.12.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Rp490.288.404,00	Rp443.326.934,00	Rp46.961.470,00	90,42
2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp2.285.778.725,00	Rp1.940.168.999,00	Rp345.609.726,00	84,88
2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp896.454.541,00	Rp796.880.323,00	Rp99.574.218,00	88,89
2.12.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp5.000.000,00	Rp4.848.000,00	Rp152.000,00	96,96
2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp508.436.987,00	Rp444.831.815,00	Rp63.605.172,00	87,49
2.12.01.2.06.0005	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Rp234.129.893,00	Rp94.535.150,00	Rp139.594.743,00	40,38
2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Rp272.051.304,00	Rp257.736.750,00	Rp14.314.554,00	94,74

	SKPD				
2.12.01.2.06.0009	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Rp369.706.000,00	Rp341.336.961,00	Rp28.369.039,00	92,33
2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp125.910.000,00	Rp8.345.000,00	Rp117.565.000,00	6,63
2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp53.650.000,00	Rp8.345.000,00	Rp45.305.000,00	15,55
2.12.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp72.260.000,00	Rp0,00	Rp72.260.000,00	-
02.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Rp319.891.975,00	Rp295.186.784,00	Rp24.705.191,00	92,28
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Rp304.891.975,00	Rp282.438.784,00	Rp22.453.191,00	92,64
2.12.02.2.01.0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Rp15.000.000,00	Rp7.470.000,00	Rp7.530.000,00	49,80
2.12.02.2.01.0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Rp274.891.975,00	Rp270.722.784,00	Rp4.169.191,00	98,48
2.12.02.2.01.0007	Penerbitan Dokumen Atas Hal Laporan Peristiwa Kependudukan	Rp15.000.000,00	Rp4.246.000,00	Rp10.754.000,00	28,31
2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Rp15.000.000,00	Rp12.748.000,00	Rp2.252.000,00	84,99
2.12.02.2.03.0005	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Rp15.000.000,00	Rp12.748.000,00	Rp2.252.000,00	84,99
02.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Rp238.620.075,00	Rp227.831.864,00	Rp10.788.211,00	95,48
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Rp218.620.075,00	Rp217.421.864,00	Rp1.198.211,00	99,45
2.12.03.2.01.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Rp218.620.075,00	Rp217.421.864,00	Rp1.198.211,00	99,45
2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Rp20.000.000,00	Rp10.410.000,00	Rp9.590.000,00	52,05
2.12.03.2.02.0008	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	Rp20.000.000,00	Rp10.410.000,00	Rp9.590.000,00	52,05
02.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Rp1.468.977.866,00	Rp1.391.172.970,00	Rp77.804.896,00	94,70
2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Rp732.020.000,00	Rp724.089.930,00	Rp7.930.070,00	98,92
2.12.04.2.01.0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Rp732.020.000,00	Rp724.089.930,00	Rp7.930.070,00	98,92
2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp386.957.866,00	Rp327.728.358,00	Rp59.229.508,00	84,69

2.12.04.2.03.0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp177.065.615,00	Rp141.402.720,00	Rp35.662.895,00	79,86
2.12.04.2.03.0005	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp76.474.206,00	Rp56.241.206,00	Rp20.233.000,00	73,54
2.12.04.2.03.0006	Kerja sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	Rp133.418.045,00	Rp130.084.432,00	Rp3.333.613,00	97,50
2.12.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp350.000.000,00	Rp339.354.682,00	Rp10.645.318,00	96,96
2.12.04.2.04.0003	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Rp350.000.000,00	Rp339.354.682,00	Rp10.645.318,00	96,96
02.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Rp164.916.400,00	Rp149.925.786,00	Rp14.990.614,00	90,91
2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	Rp164.916.400,00	Rp149.925.786,00	Rp14.990.614,00	90,91
2.12.05.2.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Rp164.916.400,00	Rp149.925.786,00	Rp14.990.614,00	90,91
JUMLAH		Rp14.533.997.508,00	Rp12.423.165.347,00	Rp2.110.832.161,00	85,48

Sumber: LRA Triwulan IV Tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser

Uraian penjelasan tabel:

Dari table diatas dapat dijelaskan bahwa dari realisasi anggaran sudah diatas 50%, namun ada 1 sub kegiatan yaitu Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya tidak terealisasi dikarenakan penetapan APBD Perubahan yang mendekati akhir tahun sehingga waktu pelaksanaannya tidak cukup untuk melakukan kegiatan pemeliharaan. Dan dari total anggaran sebesar Rp. 14.533.997.508,00 yang terealisasi sebesar Rp. 12.423.165.347,00 dengan persentase 85,48%.

BAB IV PENUTUP

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai atas hasil analisis penggunaan anggaran.

Laporan Kinerja yang tersusun ini merupakan media pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser selama tahun 2025.

Media ini juga dipakai sebagai umpan balik pengambilan keputusan pihak-pihak terkait dalam melakukan introspeksi dan refleksi untuk membuat solusi langkah-langkah perbaikan dimasa mendatang untuk meningkatkan capaian kinerja dan capaian realisasi anggaran sesuai dengan program-program dan kegiatan hingga sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser.

Di samping dikemukakan gambaran kinerja, juga dilaporkan analisis kinerja yang menggambarkan keberhasilan dan kegagalan masing-masing sasaran dan kegiatan serta permasalahan yang dihadapi sebagai faktor penghambat keberhasilan. Dengan rata-rata capaian kinerja Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mencapai/melampaui target dengan analisis keberhasilan dari masing-masing indikator sasaran, maka solusi yang dilakukan adalah memaksimalkan pelayanan dan penambahan SDM, memperpanjang masa Kerjasama dengan instansi terkait, penggunaan anggaran sesuai target dan realisasi, dan melengkapi data-data dan laporan yang dibutuhkan.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja yang telah dicapai Tahun 2025.

Tanah Grogot, 26 Februari 2026

Kepala,

 Mohd. Ismaili Yanuardi, S. Hut. MM
NIP. 197001051998031010

LAMPIRAN

I. Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Mohd. Isnaini Yanuardi, S.Hut., MM**
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : **dr. Fahmi Fadli**
Jabatan : Bupati Paser
Selaku atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian kerja ini. Setiap keberhasilan atau pun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak Kedua akan melakukan Supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Tana Paser, Oktober 2025

Pihak Kedua
BUPATI PASER,

dr. Fahmi Fadli

Pihak Pertama
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL,

Mohd. Isnaini Yanuardi, S.Hut., MM
NIP. 197001051998031010

LAMPIRAN 1
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PASER
TABEL KINERJA
TAHUN 2025

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	3. Rata-rata waktu penyelesaian dokumen kependudukan (KK, KIA dan KTP)	60 Menit
		4. Rata-rata waktu penyelesaian dokumen catatan sipil (akte kelahiran, kematian, pengangkatan anak, perkawinan/percerai an)	30 Menit
2.	Meningkatnya Instansi Pengguna Data Kependudukan	2. Persentase Lembaga Yang Memanfaatkan Data Kependudukan	25%
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	2. Penilaian SAKIP	70

PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	KET
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	Rp. 12.341.591.192,-	APBD
Kegiatan Perencanaan, Penggaran, dan Evaluasi PD	Rp. 251.374.000,-	
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 9.678.528.467,-	
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 2.285.778.725,-	
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Rp. 125.910.000,-	
2. Program Pendaftaran Penduduk	Rp. 319.891.975,-	APBD
Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Rp. 304.891.975,-	
Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran penduduk	Rp. 15.000.000,-	
3. Program Pencatatan Sipil	Rp. 238.620.075,-	APBD
Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil	Rp. 218.620.075,-	
Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Rp. 20.000.000,-	
4. Program Pengelolaan Administrasi Kependudukan	Rp. 1.468.977.866,-	APBD
Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Data Kependudukan	Rp. 732.020.000,-	
Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Adminduk	Rp. 386.957.866,-	
Kegiatan pembinaan dan pengawasan pengelolaan informasi Administrasi kependudukan	Rp. 350.000.000,-	
5. Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Rp. 164.916.400,-	APBD
Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan	Rp. 164.916.400,-	

BUPATI PASER,



dr. Fahmi Fadli

Tana Paser, Oktober 2025
**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL,**



Mohd. Isnaini Yanuardi, S.Hut., MM
NIP. 197001051998031010

LAMPIRAN 2
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PASER
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2025

1. Penjelasan Kinerja 1

Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah merujuk pada tujuan sasaran yaitu meningkatkan penataan dan pelayanan administrasi kependudukan. Dasar Hukum dalam mencapai kinerja antara lain Peraturan Bupati Paser Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Paser sebagaimana dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2015.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja memiliki 2 Indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan antara lain:

No.	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1.	Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Peningkatan kualitas pelayanan Admindakapil, masyarakat dapat dengan lebih mudah, cepat, dan akurat memperoleh dokumen kependudukan seperti KTP, KK, akta kelahiran, akta kematian, dan lainnya.	1. Jumlah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan penerbitan <u>dokumen KK, KTP, KIA</u> x 100% Jumlah seluruh dokumen KK, KTP, KIA yang diterbitkan 2. Jumlah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan penerbitan <u>dokumen catatan sipil</u> x 100% Jumlah seluruh dokumen catatan sipil yang diterbitkan	Survei Kepuasan Masyarakat pada Disdukcapil dan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)

Target Kinerja

Dalam Perjanjian Kinerja ini, setiap indikator telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Rata-rata waktu penyelesaian dokumen kependudukan (KK, KIA dan KTP)	60 Menit	Target ini di tetapkan berdasarkan capaian pada tahun-tahun sebelumnya hingga Triwulan II tahun 2025 yaitu 60 Menit dengan catatan jika jaringan dalam keadaan normal.
Rata-rata waktu penyelesaian dokumen catatan sipil (akte kelahiran, kematian, pengangkatan anak, perkawinan/perceraian)	30 Menit	Target ini di tetapkan berdasarkan capaian pada tahun-tahun sebelumnya hingga Triwulan II tahun 2025 yaitu 30 Menit dengan catatan jika jaringan dalam keadaan normal.

2. Penjelasan Kinerja 2

Meningkatnya Instansi Pengguna Data Kependudukan yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah merujuk pada tujuan sasaran yaitu meningkatkan penataan dan pelayanan administrasi kependudukan. Dasar Hukum dalam mencapai kinerja antara lain Peraturan Bupati Paser Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Paser sebagaimana dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2015.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja memiliki 1 Indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan antara lain:

No.	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1.	Meningkatnya Instansi Pengguna Data Kependudukan	Peningkatan penggunaan data kependudukan pada instansi-instansi yang ada di Kabupaten Paser	Jumlah instansi yang bekerjasama dan memanfaatkan data <u>kependudukan</u> x 100% Jumlah instansi pemerintah	Dokumen Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan instansi-instansi yang menjalin Kerjasama dengan Disdukcapil.

Target Kinerja

Dalam Perjanjian Kinerja ini, setiap indikator telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase Lembaga Yang Memanfaatkan Data Kependudukan	25%	Penetapan target indikator kinerja ini pada tahun 2025 yaitu 25% dari total 41 Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Paser, masih dibawah realisasi tahun 2022 sebesar 34,14%, tahun 2023 sebesar 46,34% dan tahun 2024 sebesar 35,71%. Namun target pada tahun 2025 tidak mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya maupun kenaikan pada tahun ini dengan menyesuaikan kompleksitas dan sumber daya yang ada. Saat ini dokumen PKS sudah dalam proses pembahasan di Ditjen Dukcapil Kemendagri untuk mendapatkan proses persetujuan lebih lanjut.

3. Penjelasan Kinerja 3

Meningkatnya Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah merujuk pada tujuan sasaran tersebut ialah meningkatkan Administrasi Umum. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Peraturan Bupati Paser nomor 19 tahun 2020 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja memiliki 1 Indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan antara lain:

No.	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Disdukcapil	Nilai Evaluasi SAKIP Disdukcapil	Laporan realisasi kinerja dan anggaran semua bidang pada Disdukcapil

Target Kinerja

Dalam Perjanjian Kinerja ini, setiap indikator telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Penilaian SAKIP	70	Target ini ditetapkan dengan melihat capaian beberapa tahun sebelumnya, dimana capaian nilai SAKIP tahun 2023 sebesar 60,58 dan capaian tahun 2024 sebesar 60,31.

II. Rencana Aksi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan /Sub. Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Rencana Program/Kegiatan				Rencana Realisasi Anggaran				Total Anggaran	Penanggung Jawab
							TWI	TWII	TWIII	TWIV	TWI	TWII	TWIII	TWIV		
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat	Penilaian SAKIP	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Indeks kepuasan pelayanan sekretariat	76	Indeks	76	76	76	76	Rp3.837.103.661,00	Rp3.613.974.245,00	Rp3.064.663.408,00	Rp1.825.849.878,00	Rp12.341.591.192,00	Sekretaris
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketepatan tahapan penyusunan dokumen perencanaan PD	100%	Persen	30%	30%	30%	10%	Rp99.150.000,00	Rp51.250.000,00	Rp0,00	Rp100.974.000,00	Rp251.374.000,00	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	Dokumen	3	3	3	1	Rp17.500.000,00	Rp17.500.000,00		Rp35.974.000,00	Rp70.974.000,00	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	Dokumen			5		Rp18.750.000,00	Rp18.750.000,00			Rp37.500.000,00	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10	Dokumen			5	5	Rp47.900.000,00				Rp47.900.000,00	
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	Laporan	1			1	Rp15.000.000,00	Rp15.000.000,00		Rp65.000.000,00	Rp95.000.000,00	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase temuan ditindaklanjuti	100%	Persen	100%	100%	100%	100%	Rp3.281.553.035,00	Rp3.283.985.990,00	Rp2.900.121.541,00	Rp212.867.901,00	Rp9.678.528.467,00	
				Persentase LHP nihil	100%	Persen	100%	100%	100%	100%						

			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	68	Orang/Bulan	68	68	68	68	Rp3.166.080.033,00	Rp3.166.080.014,00	Rp2.856.080.016,00	Rp9.188.240.063,00	
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12	Laporan	3	3	3	3	Rp115.473.002,00	Rp117.905.976,00	Rp44.041.525,00	Rp212.867.901,00	Rp490.288.404,00
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100%	Persen	100%	100%	100%	100%	Rp424.923.126,00	Rp247.260.755,00	Rp126.768.867,00	Rp1.486.825.977,00	Rp2.285.778.725,00
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Paket			3	9	Rp124.742.962,00	Rp31.291.524,00		Rp740.420.055,00	Rp896.454.541,00
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket			1		Rp2.793.849,00		Rp2.206.151,00		Rp5.000.000,00
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	28	Paket		22	3	3	Rp97.304.740,00	Rp14.468.495,00	Rp60.563.369,00	Rp336.100.383,00	Rp508.436.987,00
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	9	Paket			5	4	Rp28.319.075,00	Rp28.319.075,00	Rp51.653.955,00	Rp125.837.788,00	Rp234.129.893,00
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40	Laporan	11	6	10	13	Rp51.874.500,00	Rp71.639.661,00	Rp8.775.392,00	Rp139.761.751,00	Rp272.051.304,00
			Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4	Dokumen	1	2	1		Rp119.888.000,00	Rp101.542.000,00	Rp3.570.000,00	Rp144.706.000,00	Rp369.706.000,00
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase barang inventaris peralatan dan mesin dalam kondisi baik	50%	Persen			20%	30%	Rp31.477.500,00	Rp31.477.500,00	Rp37.773.000,00	Rp25.182.000,00	Rp125.910.000,00
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3				1	2	Rp13.412.500,00	Rp13.412.500,00	Rp16.095.000,00	Rp10.730.000,00	Rp53.650.000,00

			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100				100	Rp18.065.000,00	Rp18.065.000,00	Rp21.678.000,00	Rp14.452.000,00	Rp72.260.000,00	
2.	Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Rata-rata waktu penyelesaian dokumen kependudukan (KK, KIA dan KTP)	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Rasio kepemilikan dokumen kependudukan (KTP, KK)	98%	Persen		50%	98%	Rp67.953.993,00	Rp67.953.995,00	Rp1.981.800,00	Rp182.002.187,00	Rp319.891.975,00	Kabid Kependudukan
			1. Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase jumlah dokumen pelayanan pendaftaran penduduk	98%	Persen		50%	98%	Rp64.203.993,00	Rp64.203.995,00	Rp0,00	Rp176.483.987,00	Rp304.891.975,00	
			Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi	2	Dokumen			1	1	Rp3.750.000,00	Rp3.750.000,00	Rp7.500.000,00	Rp15.000.000,00	
			Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	8000	Dokumen	2000	2000	2000	2000	Rp56.703.993,00	Rp56.703.995,00	Rp161.483.987,00	Rp274.891.975,00	
			Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	12	Laporan			9	3	Rp3.750.000,00	Rp3.750.000,00	Rp7.500.000,00	Rp15.000.000,00	
			Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase jumlah laporan/data/dokumen penyelenggaraan pendaftaran penduduk	98%	Persen		50%	98%	Rp3.750.000,00	Rp3.750.000,00	Rp1.981.800,00	Rp5.518.200,00	Rp15.000.000,00	

			Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	2	Laporan			2		Rp3.750.000,00	Rp3.750.000,00	Rp1.981.800,00	Rp5.518.200,00	Rp15.000.000,00	
		Rata-rata waktu penyelesaian dokumen catatan sipil (akte kelahiran, kematian, pengangkatan anak, perkawinan /perceraian)	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Pelayanan Administrasi Pencatatan Sipil	98%	Persen		50%		98%	Rp47.682.500,00	Rp54.620.075,00	Rp4.635.000,00	Rp131.682.500,00	Rp238.620.075,00	Kabid Pencatatan Sipil
			Pelayanan Pencatatan Sipil	Meningkatnya layanan Administrasi Kelahiran dan Kematian	98%	Persen		50%		98%	Rp42.000.000,00	Rp51.620.075,00	Rp0,00	Rp125.000.000,00	Rp218.620.075,00	
			Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Laporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Laporan Peristiwa Penting	6000	Dokumen	1500	1500	1500	1500	Rp42.000.000,00	Rp51.620.075,00		Rp125.000.000,00	Rp218.620.075,00	
			Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase Jumlah laporan penyelenggaraan pencatatan sipil	98%	Persen		50%		98%	Rp5.682.500,00	Rp3.000.000,00	Rp4.635.000,00	Rp6.682.500,00	Rp20.000.000,00	
			Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pencatatan Sipil	4	Laporan			1	3	Rp5.682.500,00	Rp3.000.000,00	Rp4.635.000,00	Rp6.682.500,00	Rp20.000.000,00	
3	Meningkatnya Instansi Pengguna Data Kependudukan	Persentase Lembaga Yang Memanfaatkan Data Kependudukan	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase data kependudukan yang valid	98%	Persen		50%		98%	Rp796.215.706,00	Rp205.517.230,00	Rp70.585.885,00	Rp396.659.045,00	Rp1.468.977.866,00	Kabid PIAK
			1. Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase Jumlah Dokumen pengumpulan, pemanfaatan dan penyajian database kependudukan	98%	Persen		50%		98%	Rp455.100.000,00	Rp153.870.000,00	Rp0,00	Rp123.050.000,00	Rp732.020.000,00	
			Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	12	Dokumen	3	3	3	3	Rp455.100.000,00	Rp153.870.000,00		Rp123.050.000,00	Rp732.020.000,00	

			Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase jumlah dokumen/laporan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	98%	Persen		50%		98%	Rp51.115.706,00	Rp51.647.230,00	Rp10.585.885,00	Rp273.609.045,00	Rp386.957.866,00	Kabid PDIP
			Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2	Laporan			1	1	Rp0,00	Rp51.647.230,00	Rp10.585.885,00	Rp114.832.500,00	Rp177.065.615,00	
			Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2	Laporan				2	Rp51.115.706,00			Rp25.358.500,00	Rp76.474.206,00	
			Kerja sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	1	Dokumen				1				Rp133.418.045,00	Rp133.418.045,00	
			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase dokumen/laporan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	98%	Persen		50%		98%	Rp290.000.000,00	Rp0,00	Rp60.000.000,00	Rp0,00	Rp350.000.000,00	Kabid PIAK

			Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	4	Laporan	2	1	1	Rp290.000.000,00		Rp60.000.000,00		Rp350.000.000,00	
			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase pemanfaatan data kependudukan	100%	Persen	50%		98%	Rp66.876.400,00	Rp30.000.000,00	Rp1.846.810,00	Rp66.193.190,00	Rp164.916.400,00	
			Penyusunan Profil Kependudukan	Persentase laporan profil kependudukan	100%	Persen	50%		98%	Rp66.876.400,00	Rp30.000.000,00	Rp1.846.810,00	Rp66.193.190,00	Rp164.916.400,00	
			Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	4	Dokumen	1	2	1	Rp66.876.400,00	Rp30.000.000,00	Rp1.846.810,00	Rp66.193.190,00	Rp164.916.400,00	
JUMLAH														Rp14.533.997.508,00	

Tana Grogot, 21 Januari 2026



Kepala,

Mohd. Ismail Yanuardi, S. Hut. MM
NIP. 197001051998031010

III. Evaluasi Renja Triwulan 4 Tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RENSTRA pada Tahun 2022- 2026 (Akhir Periode RENSTRA)	Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA Tahun 2025)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2025 (%)		Ket				
									I		II		III		IV										
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		2				14.533.997.508		0		14.533.997.508		2.096.601.286		3.057.999.918		2.516.508.320		4.752.055.823		12.423.165.347		12.423.165.347		85,48	
		2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			14.533.997.508		0		14.533.997.508		2.096.601.286		3.057.999.918		2.516.508.320		4.752.055.823		12.423.165.347		12.423.165.347		85,48	
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat (Indeks)	30	12.341.591.192	33,13	0	76	12.341.591.192	95,97	1.568.188.136	86,77	2.687.400.818	104,25	2.258.748.810	87,03	3.844.710.179	93,51	10.359.047.943	63,32	10.359.047.943	211,05	83,94	
		2.12.01.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketepatan tahapan penyusunan dokumen perencanaan PD (Persen)	0	251.374.000	97,5	0	100	251.374.000	100	38.398.933	100	13.256.900	100	36.430.150	100	150.217.256	100	238.303.239	100	238.303.239	100	94,8	
		2.12.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	20	70.974.000	10	0	10	70.974.000	3	10.994.860	3	13.256.900	3	0	1	46.591.543	10	70.843.303	20	70.843.303	100	99,82	
		2.12.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	10	37.500.000	5	0	5	37.500.000	0	0	0	0	5	36.430.150	0	0	5	36.430.150	10	36.430.150	100	97,15	
		2.12.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	20	47.900.000	9	0	10	47.900.000	0	0	0	0	5	0	5	37.028.353	10	37.028.353	19	37.028.353	95	77,3	
		2.12.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	95.000.000	2	0	2	95.000.000	1	27.404.073	0	0	0	0	1	66.597.360	2	94.001.433	4	94.001.433	100	98,95	
		2.12.01.0202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase temuan ditindaklanjuti (Persen)	0	9.678.528.467	0	0	100	9.678.528.467	100	1.454.591.182	100	2.485.971.345	100	1.893.234.419	100	2.338.433.759	100	8.172.230.705	100	8.172.230.705	100	84,44	
				Persentase LHP nihil (Persen)	0		0		100		100		100		100		100		100			100			
		2.12.01.020001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	101	9.188.240.063	32	0	68	9.188.240.063	30	1.373.713.293	68	2.443.008.131	68	1.792.720.564	68	2.119.461.783	234	7.728.903.771	266	7.728.903.771	263,37	84,12	

2.12.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	24	490.288.404	12	0	12	490.288.404	3	80.877.889	3	42.963.214	3	100.513.855	3	218.971.976	12	443.326.934	24	443.326.934	100	90,42
2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (Persen)	0	2.285.778.725	100	0	100	2.285.778.725	100	75.198.021	100	185.158.773	100	329.084.241	100	1.350.727.964	100	1.940.168.999	100	1.940.168.999	100	84,88
2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	16	896.454.541	4	0	12	896.454.541	0	0	0	0	3	74.453.250	17	722.427.073	20	796.880.323	24	796.880.323	150	88,89
2.12.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	11	5.000.000	10	0	1	5.000.000	0	0	0	0	1	3.756.000	0	1.092.000	1	4.848.000	11	4.848.000	100	96,96
2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	33	508.436.987	5	0	28	508.436.987	0	0	22	27.255.200	3	104.829.200	7	312.747.415	32	444.831.815	37	444.831.815	112,12	87,49
2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	34	234.129.893	25	0	9	234.129.893	0	0	0	0	5	94.535.150	3	0	8	94.535.150	33	94.535.150	97,06	40,38
2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	100	272.051.304	60	0	40	272.051.304	11	61.210.521	6	26.175.303	10	30.427.041	21	139.923.885	48	257.736.750	108	257.736.750	108	94,74
2.12.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	4	369.706.000	0	0	4	369.706.000	1	13.987.500	2	131.728.270	1	21.083.600	0	174.537.591	4	341.336.961	4	341.336.961	100	92,33
2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang inventaris dalam kondisi baik (Persen)	97	125.910.000	100	0	50	125.910.000	0	0	16,67	3.013.800	0	0	33,33	5.331.200	50	8.345.000	150	8.345.000	154,64	6,63
2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	7	53.650.000	4	0	3	53.650.000	0	0	1	3.013.800	0	0	2	5.331.200	3	8.345.000	7	8.345.000	100	15,55
2.12.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	104	72.260.000	4	0	100	72.260.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	3,85	0
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : Peningkatan pelayanan dan pemenuhan kebutuhan oleh sekretariat.																						
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : Belum sempatnya terlaksana pemeliharaan karena sebagian kerusakan terjadi pada penghujung Triwulan IV.																						
Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya :																						
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD Berikutnya : Pelaksanaan pemeliharaan barang secara berkala.																						
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Rasio kepemilikan dokumen kependudukan (KTP, KK) (Rasio)	195	319.891.975	99,46	0	98	319.891.975	0	48.171.600	0	12.582.100	0	43.336.958	89,63	191.096.126	89,63	295.186.784	189,09	295.186.784	96,97	92,28
2.12.02.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase dokumen dan laporan hasil pelayanan pendaftaran	98	304.891.975	0	0	98	304.891.975	74,35	48.171.600	65,68	12.582.100	74,62	34.548.958	58,75	187.136.126	273,4	282.438.784	273,4	282.438.784	278,98	92,64

		penduduk (Persen)																				
2.12.02.01.00	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan (Dokumen)	4	15.000.000	2	0	2	15.000.000	0	0	0	0	1	7.470.000	1	0	2	7.470.000	4	7.470.000	100	49,8
2.12.02.01.00	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk (Dokumen)	16.000	274.891.975	8.000	0	8.000	274.891.975	17.844	48.171.600	15.765	12.582.100	17.910	22.832.958	14.100	187.136.126	65.619	270.722.784	73.619	270.722.784	460,12	98,48
2.12.02.01.00	Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan (Laporan)	24	15.000.000	0	0	12	15.000.000	0	0	0	0	9	4.246.000	3	0	12	4.246.000	12	4.246.000	50	28,31
2.12.02.02	Penataan Pendaftaran Penduduk			0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
2.12.02.02.00	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia (Dokumen)	20.000	0	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	50	0
2.12.02.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase jumlah laporan/data/doku men penyelenggaraan pendafataran penduduk (Persen)	98	15.000.000	0	0	98	15.000.000	0	0	0	0	100	8.788.000	0	3.960.000	100	12.748.000	100	12.748.000	102,04	84,99
2.12.02.03.00	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi terkait Pendaftaran Penduduk (Laporan)	12	15.000.000	10	0	2	15.000.000	0	0	0	0	2	8.788.000	0	3.960.000	2	12.748.000	12	12.748.000	100	84,99
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : Melakukan upaya jemput bola dengan meningkatkan pelayanan Dukcapil ke desa-desa.																						
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : Singkatnya waktu pelaksanaan kegiatan setelah perubahan																						
Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya :																						
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD Berikutnya : Meningkatkan kegiatan pelayanan Dukcapil.																						
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Rasio kepemilikan dokumen pencatatan sipil (Akte kelahiran, kematian, nikah, cerai) (Rasio)	195	238.620.075	109,53	0	98	238.620.075	0	31.577.150	0	15.105.000	0	46.655.618	99,64	134.494.096	99,64	227.831.864	209,17	227.831.864	107,27	95,48
2.12.03.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase dokumen penyelenggaraan pencatatan sipil (Persen)	98	218.620.075	0	0	98	218.620.075	33,03	31.577.150	31,08	15.105.000	35,18	40.005.618	28,8	130.734.096	128,09	217.421.864	128,09	217.421.864	130,7	99,45

2.12.03.2.01.00	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting (Dokumen)	12.000	218.620.075	6.000	0	6.000	218.620.075	1.982	31.577.150	1.865	15.105.000	2.111	40.005.618	1.728	130.734.096	7.686	217.421.864	13.686	217.421.864	114,05	99,45
2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase Jumlah laporan penyelenggaraan pencatatan sipil (Persen)	98	20.000.000	0	0	98	20.000.000	0	0	0	0	25	6.650.000	25	3.760.000	50	10.410.000	50	10.410.000	51,02	52,05
2.12.03.2.02.00.08	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil (Laporan)	4	20.000.000	0	0	4	20.000.000	0	0	0	0	1	6.650.000	1	3.760.000	2	10.410.000	2	10.410.000	50	52,05
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :			Melakukan upaya jemput bola dengan meningkatkan pelayanan Dukcapil ke desa-desa.																			
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :																						
Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya :			Efisiensi anggaran pada Triwulan I dan II sehingga belum bisa melaksanakan Penyelenggaraan Sosialisasi, dan pada Triwulan III dan IV kegiatan di desa sangat padat sehingga tidak memungkinkan melakukan sosialisasi yg tepat sasaran.																			
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD Berikutnya :			Penjadwalan waktu untuk pelaksanaan pelayanan dan sosialisasi.																			
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase data kependudukan yang valid (Persen)	0	1.468.977.866	100	0	98	1.468.977.866	100	437.720.000	100	342.912.000	100	161.058.914	0	449.482.056	0	1.391.172.970	0	1.391.172.970	0	94,7
2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase dokumen dan laporan pengelolaan informasi administrasi kependudukan (Persen)	98	732.020.000	0	0	98	732.020.000	25	437.720.000	25	57.432.000	25	92.532.000	25	136.405.930	100	724.089.930	100	724.089.930	102,04	98,92
2.12.04.2.01.00.01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan (Dokumen)	24	732.020.000	12	0	12	732.020.000	3	437.720.000	3	57.432.000	3	92.532.000	3	136.405.930	12	724.089.930	24	724.089.930	100	98,92
2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase dokumen dan laporan penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan (Persen)	98	386.957.866	0	0	98	386.957.866	0	0	0	0	20	33.431.432	80	294.296.926	100	327.728.358	100	327.728.358	102,04	84,69
2.12.04.2.03.00.03	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)	2	177.065.615	0	0	2	177.065.615	0	0	0	0	1	33.431.432	1	107.971.288	2	141.402.720	2	141.402.720	100	79,86
2.12.04.2.03.00.05	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)	4	76.474.206	1	0	2	76.474.206	0	0	0	0	0	0	2	56.241.206	2	56.241.206	3	56.241.206	75	73,54
2.12.04.2.03.00.06	Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi (Dokumen)	2	133.418.045	1	0	1	133.418.045	0	0	0	0	0	0	1	130.084.432	1	130.084.432	2	130.084.432	100	97,5

		2.12.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase dokumen/laporan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Persen)	98	350.000.000	0	0	98	350.000.000	0		0	50	285.480.000	25	35.095.482	25	18.779.200	100	339.354.682	100	339.354.682	102,04	96,96
		2.12.04.2.04.0003	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan (Laporan)	8	350.000.000	4	0	4	350.000.000	0		0	2	285.480.000	1	35.095.482	1	18.779.200	4	339.354.682	8	339.354.682	100	96,96
		Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : Pengelolaan data yang termutakhirkan secara berkala.																							
		Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : Keterlambatan terbitnya data per semester dari pusat, dan jaringan server yang terkadang bermasalah.																							
		Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya :																							
		Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD Berikutnya : Pengolahan data secara berkala.																							
5	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase pemanfaatan data kependudukan (Persen)	200	164.916.400	99	0	100	164.916.400	25	10.944.400	0		0	50	6.708.020	25	132.273.366	100	149.925.786	199	149.925.786	99,5	90,91
		2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	Persentase laporan profil kependudukan (Persen)	200	164.916.400	100	0	100	164.916.400	25	10.944.400	0		0	50	6.708.020	25	132.273.366	100	149.925.786	200	149.925.786	100	90,91
		2.12.05.2.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun (Dokumen)	4	164.916.400	0	0	4	164.916.400	1	10.944.400	0		0	2	6.708.020	1	132.273.366	4	149.925.786	4	149.925.786	100	90,91
		Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : Pengolahan data secara rutin pada rentang waktu per bulan, triwulan, semester dan tahunan.																							
		Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : Keterlambatan terbitnya data dari pusat.																							
		Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya :																							
		Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD Berikutnya : Pengolahan data manual secara berkala.																							
			JUMLAH		14.533.997.508		0			14.533.997.508		2.096.601.286		3.057.999.918		2.516.508.320		4.752.055.823		12.423.165.347		12.423.165.347			
			Rata-rata capaian kinerja Sub Kegiatan (%)																100	85,48				99,5	85,48
			Predikat kinerja Sub Kegiatan																SUB KEGIATAN	Sangat tinggi	Tinggi			Sangat tinggi	Tinggi

Tana Grogot, 21 Januari 2026

Kepala,

 Mohd. Ismail Yanuardi, S. Hut. MM
NIP. 197001051998031010

